

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik
Gampong (BUMG) Seukeum: Analisis Kinerja Pengelola di Kecamatan
Delima Kabupaten Pidie**

Fikri Rijal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: fikirijal177@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has great potential to meet the needs of its population thanks to its wealth of natural resources, such as mining, agriculture and biodiversity. Sustainable management is very important to maintain economic and environmental sustainability. Village development, which utilizes natural resources to improve the local economy, is an integral part of national development. Gampong-Owned Enterprises (BUMG) can help strengthen the village economy through two approaches, planning from below and from above. BUMG must be managed collectively and in accordance with statutory regulations to ensure community empowerment. With support from various levels of government and community participation, BUMG plays an important role in improving village welfare and prosperity. This research uses a qualitative approach that has an artistic and interpretative nature, which is descriptive analysis, which means describing the state of the research object as it is based on visible facts. This research examines the strategies for increasing community economic income through BUMG in Seukeum Village and what are the obstacles and supporters in developing the community's economy. The research results show that BUMG in Seukeum Village can improve the community's economy by providing shops that can be rented out. However, there are several obstacles, including limited budget, human resources, and technological knowledge. The supporting factors are the potential of natural resources, support from the village government and the community.

Keywords: *Community Economy, BUMG, Income.*

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan penduduknya berkat kekayaan sumber daya alamnya, seperti tambang, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan desa, yang memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan ekonomi lokal, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat membantu memperkuat perekonomian desa melalui dua pendekatan, perencanaan dari bawah dan dari atas. BUMG harus dikelola secara kolektif dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat, BUMG berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki sifat artistik dan interpretative, yang

bersifat analisis deskriptif, yang berarti menggambarkan keadaan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang terlihat. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Strategi dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui BUMG di Desa Seukeum dan Apa saja penghambat dan pendukung dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG di Desa Seukeum dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyediakan toko yang dapat disewakan. Namun, ada beberapa hambatan, termasuk keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan pengetahuan teknologi. Faktor pendukungnya adalah potensi sumber daya alam, dukungan dari pemerintah desa, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Masyarakat, BUMG, Pendapatan*

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Dengan keberagaman alam yang meliputi kekayaan tambang, hasil pertanian, dan keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan sumber daya lainnya. Namun, tantangan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan tetap menjadi fokus penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di masa depan. Tiap wilayah dan desa memiliki kekayaan alam yang beragam, dimanfaatkan oleh penduduknya guna meningkatkan ekonomi keluarga. Pembangunan desa seharusnya menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Ketika setiap desa mampu berkembang secara optimal, artinya desa tersebut dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya dengan efisien dan berkelanjutan. Desa yang mandiri dapat menciptakan peluang ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada faktor luar, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan usaha lokal, dan pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, kemandirian desa berkontribusi pada peningkatan pendapatan, lapangan kerja, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya menyokong terwujudnya kemakmuran dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, tingkat kemakmuran masyarakat, khususnya di Indonesia, dapat meningkat secara menyeluruh (Ayu Diah Amalia and Mochamad Syawie, 2015).

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Perencanaan dari bawah melibatkan inisiatif masyarakat dalam mendirikan BUMG, dengan mempertimbangkan dan meningkatkan kebutuhan serta aspirasi mereka. Sementara itu, perencanaan dari atas menunjukkan bahwa pendirian BUMG dilakukan berdasarkan petunjuk atau instruksi dari pemerintah (Dina Irawati dan Diana Elvianita Martanti, 2018). Untuk menghindari akuisisi oleh pihak bermodal besar dan memastikan tujuan utama BUMG dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat tercapai, kepemilikan lembaga ini sebaiknya diserahkan kepada gampong dan dikelola bersama secara kolektif.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan pilihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian di perkampungan (Nofiratullah, 2018). Sayangnya, posisi BUMG belum sepenuhnya diatur secara terinci dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Salah satu masalah tambahan adalah dalam memilih bentuk badan hukum yang sesuai untuk mendirikan BUMG.

Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam desa yang menerapkannya sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. BUMG berfungsi sebagai entitas ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat setempat melalui berbagai program dan kegiatan ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang tersedia di gampong, BUMG berperan sebagai pengelola yang aktif dalam merancang inisiatif perekonomian, memberikan peluang kerja, dan memastikan distribusi manfaat secara adil di tingkat lokal.

Selain itu, peran BUMG juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi gampong secara keseluruhan. Dengan demikian, BUMG tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi di tingkat desa. Selain itu, BUMG berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Dengan kolaborasi yang efektif antara BUMG dan pemerintah desa, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh gampong.

BUMG, sebagai entitas ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh gampong atau masyarakat setempat, harus didirikan dan dielola dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor keberhasilan BUMG melibatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi desa lainnya, serta dukungan aktif dari pemerintah tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan BUMG juga sangat penting.

Kebijakan dari suatu gampong untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, melalui pembentukan BUMG sebagai lembaga ekonomi masyarakat, harus didukung dengan baik. Gampong Seukeum di Kabupaten Pidie menjadi fokus penelitian ini, dengan memiliki BUMG yang didirikan pada April 2016 dan berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyewaan toko dan tenda serta penyediaan dana bagi usaha masyarakat. Studi kasus di Gampong Seukeum dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMG di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Fokus utama adalah menganalisis strategi dan kebijakan BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Data utama diperoleh dari mediator masyarakat, sedangkan data sekunder diambil dari referensi literatur. Metode analisis yang diterapkan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja dan implementasi BUMG di Gampong Seukeum.

Landasan Teori

1. Tinjauan tentang pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka mampu secara optimal meningkatkan perekonomian personal dan kolektif, mengembangkan jati diri, serta meningkatkan martabat individu dan kelompok. Konsep pemberdayaan ini bertujuan utama mencapai kemandirian dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan akses, pengetahuan, dan dukungan, pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan diri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini menempatkan individu dan komunitas sebagai agen perubahan yang aktif dalam proses peningkatan kualitas hidup, sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Anita Fauziah, 2009).

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan memberikan kekuatan kepada pihak yang mengalami keterbatasan, sekaligus mengurangi dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang terlalu mendominasi. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah menciptakan keseimbangan dalam sektor ekonomi. Pemberdayaan adalah cara di mana masyarakat dapat mengorganisir diri dan berkomunitas untuk mencapai kemampuan mengendalikan atau memiliki kendali atas kehidupan mereka masing-masing (M. Anwas, 2013). Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui industrialisasi pertanian atau peningkatan produksi pangan dengan fokus pada pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi (A.R. Chaerudin, dkk., 2020).

Usaha untuk memberdayakan masyarakat berfokus pada peningkatan kapasitas individu, terutama pada kelompok yang kurang mampu atau rentan, agar mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat tiga aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat, dikenal sebagai tri bina, yang mencakup pembinaan manusia, pembinaan usaha, dan pembinaan lingkungan (*Mardikanto and Soebianto 2012*). Salah satu inovasi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan partisipasi dalam mengelola, memanfaatkan, dan menciptakan produk baru berdasarkan potensi lokal. Untuk mendukung upaya tersebut, kegiatan seperti seminar, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya sebaiknya rutin diadakan agar masyarakat dapat terus diperbarui dan berkembang secara berkesinambungan. (*Sujana, Al Zarliani, and Hastuti 2020*)

2. Strategi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat

Menurut Sumaryo, strategi didefinisikan sebagai metode efektif yang digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya seperti tenaga, dana, daya, dan peralatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, strategi merujuk pada suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat agar mereka dapat aktif terlibat dalam pembangunan secara maksimal. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara independen dan mandiri (Hadiyanti, 2008).

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat tiga strategi utama yang dapat diimplementasikan, yakni: (a) pengembangan destinasi wisata, (b) peningkatan

pemasaran sektor pariwisata, dan (c) pemberdayaan melalui pengembangan kemitraan (Sugi Rahayu dan Fitriana, 2016). Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Dalam upaya melakukan pemberdayaan, penting untuk menerapkan berbagai pendekatan sebagai strategi yang terdiri dari lima aspek yang dikenal sebagai 5P:

Pertama, pemungkinan merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus membebaskan masyarakat dari hambatan dan rintangan yang mungkin menghambat perkembangan mereka.

Kedua, penguatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan individu mereka.

Ketiga, perlindungan menjadi hal yang krusial dalam melindungi kelompok masyarakat yang lebih lemah agar tidak mengalami penindasan dari kelompok yang lebih kuat. Perlindungan juga diperlukan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah.

Keempat, penyokongan melibatkan pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat untuk membantu mereka memenuhi tugas-tugas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kelima, pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi yang berkontribusi agar distribusi kehidupan masyarakat tetap seimbang dan adil.

Dengan menerapkan pendekatan 5P ini, diharapkan pemberdayaan dapat dilakukan secara holistik, mengakomodasi kebutuhan dan potensi masyarakat secara menyeluruh (Hadiyanti 2008).

Potensi hambatan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat mencakup beberapa aspek, seperti modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tahapan produksi, sumber daya manusia, kekurangan pasokan bahan baku, dan strategi pemasaran. Di sisi lain, dalam sektor distribusi, kendala mungkin timbul akibat kurangnya dukungan dari pemerintah dalam proses pemasaran dan ketersediaan sarana untuk memamerkan produk baik di tingkat nasional maupun internasional (Sunariani, Gorda, dan Mahaputra, 2017).

3. Pengertian *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)*

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berperan sebagai pilar ekonomi di tingkat desa, BUMG memiliki fungsi ganda sebagai lembaga sosial dan komersial yang mengutamakan kepentingan masyarakat sambil tetap menjalankan kegiatan usaha dengan orientasi mencari keuntungan. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim dan disampaikan oleh Eko (2015), menggambarkan bahwa BUMG bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian desa melalui produksi barang, tetapi juga berperan dalam mengelola keuangan desa secara lebih efektif. Dengan demikian, BUMG menjadi elemen kunci dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal sambil memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemahaman yang mendalam terhadap ketahanan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjadi suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Konsep ini, sebagaimana disorot oleh Muhammad dan Kurniawan (2020), mengedepankan perlunya mempertimbangkan kondisi nyata di setiap gampong sebagai landasan strategis. Hal ini tidak hanya memfasilitasi penyesuaian atau adaptasi berbagai aspek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memungkinkan harmonisasi dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing gampong. Dengan demikian, pendekatan yang mengakomodasi keunikan setiap gampong dalam konteks ketahanan ekonomi melalui BUMG tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan inisiatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Tahap awal dalam pengelolaan BUMG dimulai dengan menyusun analisis bisnis untuk menilai manfaatnya bagi masyarakat, serta mengumpulkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Ide-ide ini kemudian diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan baru setelah itu diberikan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Staf BUMG berusaha mencapai keberhasilan pengelolaan melalui evaluasi triwulanan dan menjaga koordinasi yang baik dengan Perangkat Gampong (Safitri dkk., 2021).

4. Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Ada beberapa peran yang signifikan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Beberapa peran tersebut antara lain:

- a. Membangun dan meningkatkan potensi serta keterampilan ekonomi masyarakat di desa, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
- b. Berperan aktif dalam usaha meningkatkan dan memperluas kualitas hidup masyarakat setempat.
- c. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai fokus utama, yang mendukung kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai landasannya.
- d. Berusaha meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi masyarakat desa.
- e. Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan pendapatan mereka, dengan tujuan meningkatkan kemakmuran bagi penduduk setempat (Salihin, 2021).

Meskipun demikian, terdapat hambatan utama dalam mengelola unit usaha BUMG, yaitu rendahnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan usaha BUMG, dan kurang optimalnya manajemen yang dilakukan oleh pengelolanya (Salihin, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMG.

Peningkatan perkonomian di wilayah perdesaan sangat diperlukan guna mendukung perkonomian Negara, Dengan kekuatan ekonomi dipedesaan maka diharapkan memberikan sumbangsi dalam memperkuat perekonomian secara luas. Pengelolaan organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka

mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Lembaga yang dapat mengelola perekonomian di desa salah satunya adalah BUMDes.

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan *life skill* (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi.

Menurut Ife Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Sedangkan menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola aset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.

BUMDes adalah salah satu program pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. pada umumnya sebagian sentra ekonomi pedesaan. BUMDes memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendongkrak pendapatan asli desa.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Subtansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini BUMDes akan

bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Dan kehadiran BUMDes ini akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan BUMDes ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa dan sebagai perusahaan desa.

Masyarakat desa Seukeum, sebagian besar masyarakatnya mempunyai tingkatan ekonomi di tingkat menengah, banyak dari mereka mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, buruh tani, tani, buruh lepas, peternak, Pegawai negara sipil, guru dan lain sebagainya yang dimana tingkat pendapatan mereka masih terbelah menengah kebawah.

Tujuan utamanya berdirinya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dapat dikatakan belum maksimal.

Tujuan akhirnya BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi *primer over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di perdesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategi dan teknis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan dari pemerintah di atasnya untuk meminimalisir rendahnya kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembang sektor ekonomi.

Hal ini dikarenakan dalam tubuh BUMDes sendiri kekurangan pengelolaan dan belum terkonsep strategi-strategi yang harus diimpelentasikan. Implementasi strategi memiliki beberapa poin yang meliputi cara mengembangkan bisnis, mengenali peluang ancaman dari luar organisasi, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan rencana pengembangan jangka panjang serta menghasilkan strategi alternatif.

BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa atau Kepala BUMDes penulis mengemukakan bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Kepala BUMDes yakni:

- a. Strategi yang dilakukan oleh BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan adanya toko desa di desa Seukeum masyarakat dapat membuka usaha di toko tersebut dengan harga sewa pertahunnya tiga juta rupiah untuk masyarakat asli Seukeum dan pembayarannya dapat dicicil dalam jangka waktu satu tahun dan harga sewa toko sangat murah dibandingkan dengan menyewa toko milik pribadi dengan harga yang sangat mahal, uang dari hasil sewa toko tersebut akan dimasukkan kedalam alokasi pendapatan belanja gampong (APBG) yang akan dipergunakan

untuk pembelian pupuk dan member utang kepada masyarakat Seukeumdengan tanpa bunga.

- b. Strategi yang kedua yang dilakukan oleh BUMDes adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut dapat membantu memperbaiki roda perekonomian yang mereka miliki. Dari strategi ini BUMDes dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat pengangguran dan ibu rumah tangga untuk meningkatkan atau mendapatkan ekonomi tambahan yang mereka miliki sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut.
- c. Strategi yang ketiga adalah pengurus BUMDes akan mendirikan program usaha berbentuk UMKM-UMKM yang dimana UMKM-UMKM ini nantinya di pegang langsung oleh masyarakat guna mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka.

2. Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Hadirnya BUMDes merupakan inisiatif dari pemerintah desa agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat maupun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat. Adapun dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Seukeum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun penghambat.

Berdasarkan pada temuan lapangan, BUMDes Desa Seukeum terus melakukan upaya guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang terbilang sangat menurun, berbagai upaya tersebut telah dilakukan oleh BUMDes namun masih belum maksimal. Sebenarnya besar partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dan kelompok-kelompok yang bermitra dengan BUMDes. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang menolak yang berkerjasama dengan BUMDes karena bayaran yang dinilai rendah, padahal untuk gaji atau bayaran itu diberikan berdasarkan pembagian hasil penjualan. Karena kami juga terkendala dengan anggaran yang kami miliki dan kurangnya pengetahuan tentang kemajuan teknologi saat ini yang mengakibatkan kami tidak dapat menggunakan teknologi sebagai alat promosi dan usaha yang kami dirikan saat ini sesuai dengan anggaran yang kami miliki.

Sebagai satuan terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa Seukeum ada beberapa faktor penghambat dalam yang di miliki oleh kepala desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Seukeum yaitu :

1. Anggaran (modal)

Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Modal meningkatkan kualitas IPTEK. Adapun Sumber daya modal terdiri dari barang-barang uang dan lahan. modal berperan penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi perdesaan karena modal juga dapat meningkatkan produktivitas suatu desa. keberadaan BUMDes pada masyarakat gampong Seukeum sebagai alternatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, berdasarkan wawancara dengan bapak Ilyas menyebut bahwa keberadaan kegiatan BUMDes didesa kami masih terbatas pada anggaran yang kami miliki sehingga kami tidak dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat secara menyeluruh karena dana yang kami miliki masih terbilang sangat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola kegiatan usaha ditengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki.

Upaya mengatasi kendala yang dialami oleh badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. tentunya dalam anggaran dana pemerintah harus siap membantu masyarakat desa yang benar-benar serius dalam mebanggun usaha yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi mereka. Pemerintah setempat harus berkordinasi dengan pemerintah pusat agar pemerintah pusat memberikan solusi atau bantuan kepada pemerintah desa. Dan mebanggun atau mendirikan program usaha yang hasilntya dapat berkembang dengan cepat, sehingga dapat membantu kenaikan perekonomian atau anggaran yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sebuah proses berpengaruh pada pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk melakukan proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan proses pembangunan. BUMDes masih minim akan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam kebanyakan dari mereka kurang memiliki kreatifitas dan kemampuan dalam menjalankan sebuah usaha yang dijalankan yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang dengan mengikuti kebutuhan yang masyarakat butuhkan pada saat ini.

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat dapat mendorong percepatan proses pembangunan, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Kebanyakan dari masyarakat tidak mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi sebagai bahan promosi suatu usaha yang dijalankannya, padahal pada saat ini teknologi sangat berpengaruh kepada masyarakat, jika dilihat dari kebanyakan orang tidak sedikit orang menggunakan teknologi sebagai alat pembantu dalam pekerjaan mereka. Akan tetapi pengurus BUMDes dan masyarakat sekitar tidak terlalu paham bagaimana cara menggunakan teknologi sebagai bahan promosi.

Untuk mengatasi beberapa faktor di atas sudah seharusnya BUMDes melakukan pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha yang mereka jalani dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan arahan dan tujuan bagaimana mekanisme usaha yang akan mereka jalankan dan bagaimana cara menggunakan teknologi sebagai alat promosi.

Adapun faktor pendukung yang dimiliki desa Seukeum dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia

Sumber daya alam yang relative lengkap dimiliki oleh Desa Seukeum , karena Desa Seukeum memiliki lahan yang sangat luas. Potensi alam yang layak dapat dengan mudah bagi masyarakat Desa Seukeum Cut untuk memberdayakan apa yang dimiliki.

2. Dukungan dari Pemerintah Desa

Dukungan dari Pemerintah Desa merupakan salah satu faktor pendukung yang membantu kelancaran pemberdayaan. Adanya dukungan dari pemerintah Desa dapat mendorong kerja sama untuk memaksimalkan usaha guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Keberadaan BUMDes Bersama lahir karena inisiatif dari Pemerintah Desa dan juga masyarakat. Keberadaan BUMDes tentunya tidak bisa lepas dari dukungan atau memperkuat eksistensinya sebagai lembaga usaha. Adapun faktor pendukung keberadaan BUMDes adalah bentuk dukungan yang kuat dari pemerintah Desa. Dukungan Pemerintah Desa adalah komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui BUMDes dan dana desa khusus yang dialokasikan untuk BUMDes Bina Bersama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ilyas selaku Keuchik di Desa Seukeum bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka menjalankan program BUMDes yang maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Seukeum.

3. Dukungan dari masyarakat

Dalam menjalankan unit usaha BUMDes agar berjalan sesuai dengan fungsinya harus didukung oleh masyarakat setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu pada unit usaha penyewaan 5 unit toko, 2 unit rumah sewa dan penyewaan tenda. Dimana unit usaha ini sudah membantu masyarakat sekitar dapat dengan mudah mencari kebutuhan pokok sehari-hari seperti salah satunya usaha yang di sediakan pada penyewaan toko yaitu penjualan sayur dan perlengkapan dapur lainnya. Dalam hal ini sebagian kecil masyarakat sudah memberikan dukungan terhadap program BUMG.

PENUTUP

Strategi yang dilakukan oleh BUMG ialah pengadaan toko desa, memberikan pembiayaan kepada masyarakat, dan mendirikan program usaha berbentuk UMKM. pada dasarnya terbilang cukup memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya dalam pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan dari segi bisnis BUMG, Adapun faktor yang menjadi penghambat BUMG ialah Faktor Anggaran, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor pendukung ialah Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Dukungan dari Pemerintah Desa dan Dukungan dari masyarakat. dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari keberhasilan dalam menjalankan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Sueharto, Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat : Jurnal Comdev, (Jakarta, 2004),3.
- Eko, S. 2015. “Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- Ginanjari Kartasmita, Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta, 1996),142.
- Hadiyanti, Puji. 2008. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari, Jakarta Timur.” Perspektif Ilmu Pendidikan 17(IX):90–99.
- Jim ife Frank Tesoriere, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Yogyakarta, 2008),423.
- Kholil, Syukur. 2006. Metodologi. Penelitian Komunikasi. Bandung: Citapustaka.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebianto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Muhammad, and Rudi Kurniawan. 2020. “BUMG Yang Mensejahterakan, Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Dilingkungan Pemerintah Kota Lhoksuemawe).” Reformasi Administrasi 7(2):96–106. doi: 10.31334/reformasi.v7i2.1059.
- Nofiratullah, Nofiratullah. 2018. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.”
- Safitri, Irma, Nila Trisna, Ikhsan Ikhsan, and Vellayati Hajad. 2021. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi 5(2):39–47.
- Salihin, Agus. 2021. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik.” Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 7(1):96–104.
- Sugi Rahayu, Utami Dewi, and Kurnia Nur Fitriana. 2016. “Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Penelitian Humaniora 21(1):1–13.
- Suharmi Arikunto. 1992. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujana, I. Wayan, Wa Ode Al Zarliani, and Hastuti Hastuti. 2020. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengolahan Rumput Laut.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI 4(1):24–33. doi: 10.35326/pkm.v4i1.573.
- Sunariani, Ni Nyoman, A. A. N. Oka Suryadinatha Gorda, and Ida I. D. M. Rai Mahaputra. 2017. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali.” Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 2(1):221–36.